

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdussalam, R. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.

Adhari, A. (2020). *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Afabeta.

Arief, B. N. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____ (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____ (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

_____ (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.

_____ (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

_____ (2014). *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Atmasasmitha, R. (1992). *Teori & Kapita Selektu Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco.

Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.

Badan Legislasi DPR RI. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta. pdf.

- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Chaplin, C.P. (1993). *Kamus Lengkap Psikologi, Terj. Kartini Kartono*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Davies, P., Francis, P., & Jupp, V. (2003). *Victimology, Victimisation and Public Policy*. Hampshire and New York: Palgrave Macmillan.
- Djannah, F. (2013). *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS.
- Dulkiah, H. M. (2020). *Sosiologi Kriminal*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung.
- Friedman, L. M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan Wisnu Basuki*. Jakarta: Tatanusa.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Gosita, A. (1987). *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap para Korban Perkosaan*. Jakarta: Ind.Hill.Co.
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak, Akademi Presindo*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunakaya, A. W., & Irianto, P. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Sleman: CV Budi Utama.
- Harahap, M., dkk. (2023). *Refleksi Politik Hukum Pidana*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

- Hartanti, E. (2016). *Tindak Pidana Korupsi, Edisi kedua, Cetakan keenam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, H. (2021). *Nilai-nilai Viktimologi Dalam Hukum Pidana Islam (Telaah Tindak Pidana Kisas)*. Ciputat: Sejahtera Kita.
- Hathout, H. (1994). *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam, Terj. Tim Penterjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI.
- Heroepoetri, A., & Amalia, N. (1998). *Pengintegrasian Hak Asasi Perempuan dan Perspektif Gender*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Hoefnagels, G. P. (1969). *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*. Holland: Kluwer-Deventer.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.
- Indah, C. M. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Perempuan. (2020). *Naskah Akademik & Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan.

- Kemintaraan Partnership. (2011). *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan serta Indeks Persepsi Penyiksaan*. Jakarta Selatan: The Partnership for Governance Reform.
- Kenedi, H. J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kenedi, H. J. (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Cet. I*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lestari, M. D., dkk. (2016). *Psikologi Seksual*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Maerani, I. A. (2018). *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Semarang: Unissula Press.
- Makfud. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum, Cet. ke-7*. Jakarta: Kencana.
- Mattalatta, A. (1987). *Santunan bagi Korban*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moeljatno (2002). *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Mudzakir. (2010). *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah: Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*.

Yogyakarta: Kementerian Hukum dan Ham RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Mukhlis, R. (2019). *Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia*. Riau: Taman Karya.

Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Centre.

Mulyana, D. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Munti, R. B. (2008). *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA.

Novitasari, M. dan Kusuma, T. H. (2022). *Buku Saku UU TPKS 12/2022*. Jakarta: Rutgers Indonesia dan Cakra Wikara Indonesia.

Nursadi, H. (2007). *Sistem Hukum Indonesia, Cet. 1, Ed. 2*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Nursadi, H. (2007). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Poerwandari, K. (2011). *Bila Kita Adalah Korban, Jurnal Perempuan Edisi 71, Cet. Pertama*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Ravena, H. D., & Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.

- Rifai, E. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Rifai, E., & Maroni. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Lampung: Unilam Press.
- Rodliyah, & Sidik, S. H. (2019). *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. Depok: Rajwa Pers.
- Rohman, A. (2019). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sahetapy, J.E. (1987). *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saifullah. (2018). *Tipologi Penelitian Hukum (Sejaarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung: PT Refika Aditama..
- Saini, Y., & Annisa, F. (2022). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Padang: Badan Penerbit Universitas Bung Hatta.
- Sari, K. I. P., dkk. (2020). *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Savitri, I. (2008). *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1981). *Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press.

- Subhan, Z. (2001). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2011). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiharto. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Semarang: Unissula Press.
- Susiswo. (2018). *Hukum Pidana (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pendekatan Viktimologi)*. Yogyakarta: K-Media.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: CV Budi Utama.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan.
- Tardi, S. A., dkk. (2023). *Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Tency, M. H. S., & Elmi, I. (2009). *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Walklate, S. (2003). *Can There be a Feminist Victimology?*. Hampshire and New York: Palgrave Macmillan.
- Waluyo, B. (2012). *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wati, B. E. (2015). *Victimologi*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

World Health Organization. (2010). *Preventing Intimate Partner and Sexual Violence Against Women: Taking Action and Generating Evidence*. Geneva: World Health Organization.

Yantzi, M. (2009). *Kekerasan Seksual & Pemulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat, Cetakan 1*. Jakarta: Gunung Mulia.

Yulia, R. (2013). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

2. Jurnal

Anggraeni, N. (2021). "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Al Ahkam*, 17(2).

Ansori, L. (2017). "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis*, 4(2).

Arliman, L. (2013). "Komnas HAM Sebagai State Auxialiary Bodies di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1).

Aulia, N. (2021). "Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2019)." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Chariansyah, H. (2023). "Pelaksanaan Hukum Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak sebagai Pembaruan Hukum Perlindungan Anak." *Begawan Abioso*, 14(1).

- Herfiana, L., & Firmansyah, H. (2021). "Kekerasan Seksual yang Terjadi Antar Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pid. Susanak/2019/Pn Srg)." *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2).
- Karlina A., & Prabowo, H. (2014). "Pelecehan Seksual di Angkutan KLR Ekonomi Dari Perspektif Pelaku." *The 17th FSTPST Of International Symposium*, 2(1).
- Khaizar, M. A. Z. (2022). "Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).
- Lubis, M. R., dkk. (2023). "Sosialisasi Kekerasan Seksual pada Anak serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1).
- Luthan, S. (2009). "Asas dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1).
- Manuputty, S. H. (2023). "Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie)." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(1).
- Murdijana, D., dkk. (2019). *Risalah Kebijakan Kekerasan Seksual: Stigma yang Menghambat Akses pada Pelayanan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Noviani, U. Z., dkk. (2018). "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Jurnal Penelitian dan PPM*, 5(1).

- Nurisman, E. (2022). "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2).
- Prastyawan, B. A. (2020). "Juridical Review of Legal Protection for Victims of Sexual Harassment as a Form of State Responsibility." *Journal of Creativity Student*, 5(2).
- Rahayu, M. M., Prihatinah, T. L., & Legowo, T. S. (2023). "Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia." *Soedirman Law Review*, 5(2).
- Raseukiy, S. A. G., & Aulia, Y. "Membuka Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia: Tinjauan Paradigmatis Atas Penegakan Hukum." *Majalah Hukum Nasional*, 49(1).
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)." *Balobe Law Journal*, 2(1).
- Wirawan, I. K. A., & Permatasari, P. (2022). "Juridical Review of Law Number 12 of 2022 Concerning Criminal Acts of Sexual Violence in Accessibility of Justice For Women." *Iblam Law Review*, 2(3).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*

(Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Internet

Adminlbh. (2020). "Kekerasan seksual dalam Intitusi Pendidikan". Diakses dari <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/>. pada tanggal 14 November 2021.

Budyanto. (2019). “Kebijakan Hukum Pidana”,
<https://budi399.wordpress.com/2019/04/01/kebijakan-hukum-pidana/>.

Diakses pada tanggal 6 Juli 2020, pukul 21.35 WIB).

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana, diakses
pada tanggal 27 Juni 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana, diakses
pada tanggal 28 Juni 2023.

<https://www.k4health.org/toolkits/indonesia/pelecehan-dan-kekerasan-seksual>,
diakses pada tanggal 27 Juni 2023.

<https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, diakses
pada tanggal 27 Juni 2020.

JDHI Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2023). *UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Diakses dari
<https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>, pada tanggal 28 November 2023.

Kupipedia. (2021). “Sistem Hukum Terkait Kekerasan Seksual di Indonesia dan Reformasi Hukum yang Dibutuhkan”. Diakses dari
https://kupipedia.id/index.php/Sistem_Hukum_Terkait_Kekerasan_Seksual_Di_Indonesia_Dan_Reformasi_Hukum_Yang_Dibutuhkan#Daftar_Pustaka,
pada tanggal 2 Desember 2023 pukul 11.00 WIB.

Rosyid, M. A. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: IAIN Jember. Diakses dari
<http://digilib.uinkhas.ac.id/2820/1/buku%20diktat%20hukum%20pidana.pdf>, tanggal 27 November 2023.

Wibowo, Antonius PS, “Kerahasiaan Identitas Korban Tindak Pidana”, diakses dari https://www.kompas.id/baca/opini/2022/08/14/kerahasiaan-identitas-korban-tindak-pidana?open_from=Opini_Page, tanggal 10 Oktober 2024.

5. Wawancara

Herdiyani, R. Wakil Ketua Yayasan Kalyanamitra. *Wawancara*. Jakarta, 24 November 2023. Pukul 10.00 WIB.

Maharani. Y. Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Wawancara*. Jakarta, 26 Maret 2024. Pukul 10.00 WIB.

Rachmawati, R. Plt. Asdep Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). *Wawancara*. Jakarta, 18 Desember 2023. Pukul 10.00 WIB.

Ratnawati, R. Ketua Tim Resource Center Komnas Perempuan. *Wawancara*. Jakarta 8 Desember 2023. 20.00 WIB.

Respatiningsih, D. Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Wawancara*. Jakarta, 22 Maret 2024. Pukul 14.00 WIB.

Sari, Y. P. Staf Devisi Pelayanan Hukum LBH Apik Jakarta. *Wawancara*. Jakarta, 5 Desember 2023. Pukul 10.00 WIB.